
**PERANAN ORGANISASI LOKAL DALAM PENGELOLAAN BANTARAN
SUNGAI CITARUM
(Studi Kasus Pada Warga Peduli Lingkungan Di Sektor 7, Kecamatan Baleendah)**

**Auriel Karina S.Z.¹, Rudi
Saprudin Darwis², Gigin Ginanjar
Kamil Basar³**

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu
Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas
Padjadjaran

²Departemen Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

³Departemen Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP Universitas Padjadjaran

Article history

Received : 2022-12-24

Revised : 2023-07-12

Accepted : 2023-08-06

*Corresponding author

Email : ¹(auriel18001@mail.unpad.ac.id)

²(rudi.darwis@unpad.ac.id)

³(gigin@unpad.ac.id)

No. doi: 10.24198/focus.v6i1.43913

ABSTRAK

Pengelolaan Sungai Citarum tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Warga Peduli Lingkungan (WPL) merupakan salah satu organisasi lokal yang berperan aktif dalam pengelolaan Sungai Citarum, termasuk bantaran Sungai Citarum di Desa Rancamanyar di Sektor 7, Kecamatan Baleendah. Hadirnya organisasi lokal dapat membuat kegiatan komunitas menjadi lebih efisien seperti dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggapi masalah lebih cepat. Dalam hal ini, organisasi lokal dapat membuat masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan peranan organisasi lokal, WPL, terkait pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Desa Rancamanyar, berdasarkan empat peran organisasi lokal yang dijelaskan oleh Norman Uphoff diantaranya; *Intra-organizational Task*; *Resource Task*; *Service Task*; *Ekstra-Organizational Task*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik penelitian studi kasus yaitu meliputi wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa WPL berhasil melakukan empat peranannya dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Desa Rancamanyar, Sektor 7, Kecamatan Baleendah. Namun berdasarkan empat peranan tersebut, WPL masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek *Resource Task*. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berdasarkan analisis, dirumuskan *Plan of Treatment* berupa pelatihan anggota WPL sehingga sumber daya yang tersedia semakin meningkat dalam melakukan aktivitas pengelolaan lingkungan.

Kata Kunci: Organisasi Lokal, Pengelolaan Bantaran Sungai, Peranan.

**THE ROLE OF LOCAL ORGANIZATIONS IN
MANAGEMENT OF THE CITARUM RIVER BANK**

ABSTRACT

Management of the Citarum River is inseparable from the active participation of the community. Warga Peduli Lingkungan (WPL) is one of the local organizations that plays an active role in the management of the Citarum River, including the banks of the Citarum River in Rancamanyar Village in Sector 7, Baleendah District. The presence of local organizations can make community activities more efficient, such as increasing the

community's ability to respond to problems more quickly. In this case, local organizations can make the community improve the community's ability to manage the environment.

This study aims to describe the role of a local organization, WPL, related to the management of the Citarum River bank in Rancamanyar Village, based on the four roles of local organizations described by Norman Uphoff including; Intra-organizational Task; Resources Tasks; Service Tasks; Extra-Organizational Tasks. This study uses a descriptive qualitative approach with case study research techniques, which include in-depth interviews, observations, documentation studies, and literature studies. Data analysis was carried out through several stages including data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study illustrate that WPL has succeeded in carrying out its four roles in the management of the Citarum River bank in Rancamanyar Village, Sector 7, Baleendah District. However, based on these four roles, WPL still needs improvement, especially in the aspect of Resource Task. Therefore, efforts are needed to optimize existing resources. Based on the analysis, a Plan of Treatment is formulated in the form of training for WPL members so that the available resources will increase in carrying out environmental management activities.

Keywords: Local Organization, Riverbank Management, Role.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, *World Bank Nation Geographic Indonesia* menobatkan Sungai Citarum sebagai sungai yang paling kotor di dunia. Pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum meliputi pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah domestik baik limbah cair domestik maupun sampah domestik (Juniarti, 2020).

Penggunaan sumber daya alam yang tidak tepat (tidak terkontrol, tidak terencana) akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta penurunan kualitas maupun perubahan kuantitas air sungai sehingga akan mengurangi daya tampung sungai terhadap air hujan (akibat terjadinya pendangkalan) (Sari, 2019).

Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum memiliki peran penting dalam mengelola bantaran Sungai

Citarum, mereka merupakan sumber utama yang mampu memajukan pengelolaan bantaran sungai Citarum (Updani, 2017).

Oleh karena itu munculah salah satu organisasi lokal dibidang lingkungan yang berada di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, yang berpartisipasi dalam pengelolaan bantaran sungai Citarum yaitu Warga Peduli Lingkungan (WPL). Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat sekitar untuk dapat mengelola lingkungannya secara mandiri sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik kedepannya.

Minimalnya Sekurang-kurangnya Warga Peduli Lingkungan (WPL) mampu merubah perilaku masyarakat untuk tidak terus memperburuk kondisi DAS Citarum. Dalam mengkaji peran suatu organisasi lokal dapat menggunakan konsep dari Uphoff pada tahun 1984. Organisasi lokal memiliki peran yang sangat penting dalam

pengembangan masyarakat, Norman Uphoff menyebutkan di dalam bukunya bahwa organisasi lokal memiliki empat peran yaitu: *Intra-organizational Task*; membahas tentang perencanaan dan manajemen konflik, *Resource Task*; membahas tentang pengumpulan sumber daya dan efisiensi sumber daya termasuk finansial, *Service Task*; membahas tentang pelaksanaan dan juga koordinasi pelayanan, *Ekstra-Organizational Task*, membahas tentang kontrol kebijakan juga berupaya membuat kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan (Uphoff & Esman, *Local Organizational Intermediaries in Rural Development*, 1984).

Apabila dilihat dari sudut pandang pekerja sosial, kondisi Sungai Citarum yang sudah tercemar ini dapat menjadi permasalahan sosial. Tercemarnya Sungai Citarum dapat menyebabkan kekurangan air bersih, bencana banjir, yang berdampak bagi masyarakat sekitar. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka masyarakat akan terancam kesehatannya dengan berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya air bersih dan bencana banjir.

Dominelli (2014) mengatakan berpandangan bahwa krisis lingkungan dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan budaya yang berakar pada ketidakadilan lingkungan yang memperburuk ketidakadilan yang sudah ada dalam struktur sosial ekonomi, politik, dan budaya. Ketidakadilan lingkungan yang dimaksud adalah kegagalan masyarakat untuk memastikan pemerataan sumber daya bumi (alam) dalam memenuhi kebutuhan manusia, sekaligus menyediakan kesejahteraan manusia dan planet bumi saat ini dan di masa depan (Dominelli, *Promoting environmental justice through green social work practice: A key challenge for practitioners and educators*, 2014).

Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan organisasi lokal dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum fokus di Desa

Rancamnyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

KAJIAN TEORI

Peran Organisasi Lokal

Intra-Organizational Task

a. Menyusun rencana dan tujuan lembaga

Alder (1999) dalam Rustiadi (2008) menyatakan bahwa: "perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu." (Rustiadi, 2008).

b. Manajemen konflik

Menurut Ross (1993) dalam Sutjiati (2009), Manajemen Konflik adalah langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga (Sutjiati, 2009).

Resource Task

a. *Resource mobilization*

Klandermans (1984), dengan mengutip pendapat Menurut Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow (Klandermans, 1984), menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory* (RMT) menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumber daya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi

individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial (Klandermans, 1984).

b. Resources Manajemen

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Marwansyah (2010), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010).

Service Task

a. Aktivitas pelayanan

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) pelayanan yang baik, yaitu pelayanan yang dapat meningkatkan relevansi, ketepatan waktu, dan efisiensi layanan dengan terlibat dalam koordinasi mereka, kemudian tidak hanya dalam keputusan mengenai waktu dan tingkat layanan tetapi juga dalam evaluasi dan modifikasi layanan dalam kaitannya dengan kebutuhan lokal (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974).

b. Integrasi Pelayanan

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) melibatkan organisasi lokal dalam tugas integrasi layanan tampaknya menawarkan peluang kepada lembaga pemerintah dan swasta untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari layanan mereka (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974).

Ekstra-Organizational Task

a. Kontrol kebijakan

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) organisasi lokal berfungsi sebagai kontrol dan koordinasi yang lebih besar dari bawah harus tersedia untuk melengkapi jika tidak menggantikan pengawasan

atasan politik dan administratif (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974).

b. Claim-making pemerintah

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) pembuatan klaim sebagai aktivitas organisasi lokal akan sulit jika tanpa mengacu pada orientasi pemimpin. Organisasi lokal harus memiliki kemampuan untuk membuat klaim secara positif yang kemudian dapat dianggap oleh para pemimpin politik atau pemerintah sejauh mereka menginginkan kepuasan yang lebih besar dari masyarakat pedesaan dan untuk mengartikulasikan dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan bantuan diri sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah. Ketika organisasi lokal telah dapat membuat klaim yang kemudian dianggap oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah maka organisasi lokal akan dipastikan dapat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan termasuk kebijakan pembangunan dan pembuatan alokasi anggaran yang dilakukan pemerintah (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974).

Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum

Menurut Asdak (2007) Pengelolaan bantaran sungai merupakan sebuah proses formulasi dan implementasi suatu kegiatan maupun program yang mempunyai sifat manipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di daerah aliran sungai dilakukan agar mampu memperoleh manfaat secara produksi dan jasa tanpa menyebabkan adanya kerusakan sumberdaya air dan tanah (Asdak, 2007).

Berbagai upaya pengelolaan Sungai Citarum sudah dilakukan sebelumnya oleh berbagai pihak, namun masih bersifat parsial, sektoral, dan masih belum berkelanjutan. Karena tidak belum adanya sinergi di antara sektor dan program yang ada, sehingga hal tersebut

membuat berbagai program pengelolaan sungai tersebut tidak berjalan dengan baik.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengeluarkan program terbaru pada bulan Februari tahun 2018, yaitu Program Citarum Harum. Program ini mengusung konsep dan gagasan yang hampir serupa dengan program-program sebelumnya, namun dibawah langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam program ini penanganan Sungai Citarum akan dibagi menjadi tiga tahap yakni hulu, tengah, dan hilir. Di mana yang dalam implementasinya akan terintegrasi oleh mengintegrasikan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan juga semua kementerian terkait; termasuk di dalamnya Kodam III Siliwangi dan juga Polda Jawa Barat (Yayan & Aziz, 2021).

Pekerja Sosial Lingkungan

Menurut Dominelli (2014), bahwa *green social work* merupakan pendekatan holistik bagi pekerja sosial yang mempunyai keterlibatan di dalam permasalahan ekologi dan lingkungan. Pendekatan *green social work* ini mengintegrasikan analisis struktural yang mempunyai pusat pada institusi sosial serta hubungan sosial bersama dengan perannya di dalam menanggapi kebutuhan kesejahteraan individu, kelompok, serta komunitas dan juga kepedulian terhadap lingkungan (Dominelli, Promoting environmental justice through green social work practice: A key challenge for practitioners and educators, 2014).

Dalam penelitiannya, Ramdani (2020) mengatakan bahwa *green social work* ini dikatakan sebagai sebuah bentuk praktik pekerjaan sosial profesional yang mempunyai fokus pada saling ketergantungan di antara individu dengan individu, organisasi sosial dengan hubungan diantara orang-orang bahkan dengan flora dan fauna di habitat fisiknya, interaksi di antara krisis lingkungan sosial ekonomi dengan fisik, serta perilaku

interpersonal yang dapat merusak kesejahteraan manusia di planet bumi ini (Ramdani, 2020).

Saat ini lingkungan hidup belum banyak diperhatikan oleh ahli kesejahteraan sosial dan pekerja sosial. Hal ini dapat dilihat dari intervensi yang dilakukan terhadap permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat yang belum memperhatikan dan memprioritaskan aspek lingkungannya. Faktor lingkungan ini baru disadari oleh para ahli di bidang kesejahteraan sosial, ketika mereka membahas dampak dari kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Para ahli menyadari, bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan serta kesejahteraan manusia atau masyarakat (Purwowibowo, Hariyono, & Wahyudi, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, di mana metode ini merupakan metode yang ini sukar diukur secara kuantitatif dengan angka, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis kualitatif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi bahan pustaka yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, gambar, peta, jurnal, dan kisah-kisah sejarah, dsb. Studi ini dapat mempelajari berbagai referensi atau bahan pustaka, serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan konsep-konsep dan data diperlukan. landasan teori yang akan diteliti. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Penulis akan menganalisis bagaimana peranan organisasi lokal WPL dalam pengelolaan bantaran Sungai

Citarum di Sektor 7, Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bnadung. Di mana peranan organisasi lokal WPL dapat menjadi contoh bagi masyarakat sekitar bantaran Sungai Citarum, khususnya di Desa Rancamanyar. Maka dari itu, analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah melihat peranan organisasi lokal WPL dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum secara menyeluruh, begitu juga dengan kekurangan yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intra-Organizational Task

a. Menyusun Rencana dan Tujuan

Menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008) bahwa perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, yang tertulis bahwa dalam menyusun rencana dan tujuan, WPL pertama-tama menentukan target yang ingin dicapainya sebagai organisasi lokal di bidang lingkungan yaitu memfokuskan aktivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, WPL menyusun tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai tujuannya yang di mulai dari mengidentifikasi lokasi beserta masyarakatnya, melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat. Kemudian, hingga menyerahkan kepada masyarakat bagaimana perencanaan dan tujuan aksi bagi dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya. Dalam penelitian ini, WPL melakukan observasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Rancamanyar, mengidentifikasi tokoh

masyarakat yang ada di Desa Rancamanyar untuk menjadi *community organizer*, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui apakah mereka memiliki keresahan yang sama. Selanjutnya, hingga pada akhirnya WPL memfasilitasi untuk masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan yang ada, bagaimana tahapan untuk menyelesaikan permasalahan, sampai proses eksekusi yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Rancamanyar namun tetap dalam pendampingan WPL. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam menyusun rencana dan tujuan, WPL sangat bergantung kepada kondisi dan situasi yang ada di Desa Rancamanyar beserta masyarakat yang terlibat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan kemampuannya dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pengelolaan bantaran Sungai Citarum yang berkelanjutan.

b. Manajemen Konflik

Menurut Ross (1993) dalam Sutjiati (2009) manajemen konflik adalah langkah-langkah yang diambil pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, bahwa dalam menangani konflik yang ada di masyarakat, musyawarah dan komunikasi adalah salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh oleh WPL. Untuk menyelesaikan konflik yang ada, WPL memberikan fasilitas sekaligus menjadi penengah bagi masyarakat di Desa Rancamanyar. WPL menilai bahwa gesekan atau konflik yang terjadi di masyarakat adalah hal yang wajar karena akan sulit untuk menyatukan berbagai sudut pandang ke dalam suatu proses ataupun kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Maka komunikasi dan skill keterampilan mendengarkan yang baik

merupakan kunci untuk menjadi pendamping bagi masyarakat. Dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Desa Rancamanyar, yang tentunya melibatkan banyak masyarakat, WPL menganggap bahwa pengalaman untuk mendampingi masyarakat menjadi suatu merupakan hal pelajaran yang penting agar dapat menjadi penengah yang baik dalam setiap situasi dan kondisi demi tercapainya tujuan.

Resource Task

a. Resource Mobilization

Klandermans (1984), dengan mengutip pendapat Menurut Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy dan Zald, dan Snow (Klandermans, 1984), menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory* (RMT) menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural (*structural factors*), seperti ketersediaan sumber daya (*the availability of resources*) untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.

(Klandermans, 1984). WPL memulai karirnya dengan misi gerakan sosial, hingga pada akhirnya WPL mendapatkan banyak sumber daya dari masyarakat-masyarakat yang memiliki kesamaan pemikiran dan dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuannya. WPL melibatkan tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat dalam membuat perencanaan dan tujuan untuk permasalahan lingkungan yang ada di bantaran Sungai Citarum Desa Rancamanyar. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, WPL berhasil memberdayakan sumber daya yang ada di Desa Rancamanyar untuk mengelola bantaran Sungai Citarum yang berlanjut. Untuk menunjang kegiatan tersebut, WPL juga merekrut fasilitator untuk memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan segala potensi yang ada. Rubin dan Rubbin dalam (Green

& Haines, *Asset Building & Community Development* (Fourth Edi), 2016) juga mengatakan organisasi lokal juga membuat aksi komunitas menjadi lebih efektif yang dapat dilihat dari organisasi dapat memberikan keberlanjutan. Memang keanggotaan bisa berubah namun organisasi tetap dapat melanjutkan misinya. Keberlanjutan penting dalam untuk menarik sumber daya, terutama dari fondasi dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah. Dengan fasilitator yang ditugaskan oleh WPL dalam pembinaan dan pendampingan, WPL berhasil mengembangkan keahlian sumber daya yang ada dari jejaring yang dilakukan oleh WPL. WPL berhasil berjejaring dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, dan program ESP-USAID berupaya membangun fasilitas *septic tank* kolektif bagi masyarakat. Program tersebut berhasil membawa perubahan perilaku masyarakat di Desa Rancamanyar yang dahulu sebagian masyarakat masih BAB di tepi Sungai Citarum, kini sudah memiliki kamar mandi sendiri dan pembuangannya langsung mengarah ke *septic tank*. Selain itu, WPL juga mengembangkan organisasinya dengan berjejaring dengan pihak-pihak formal baik itu nasional maupun internasional. Hal tersebut didukung dengan ketersediaan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk mengembang skill sekaligus untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Oleh karena itu, dalam aspek *resource mobilization*, WPL berhasil mengembangkan organisasinya melalui sumber daya yang tersedia walaupun masih kesulitan dalam mempertahankan sumber daya yang sudah direkrut.

b. Manajemen Sumber daya

Menurut Marwansyah (2010), Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia,

rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial (Marwansyah, 2010). Dalam aspek manajemen sumber daya resource, WPL mendayagunakan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin. WPL percaya bahwa dalam mengembangkan organisasinya, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang utama. Beberapa sumber daya yang tersedia mengikuti program pelatihan untuk pengembangan organisasi dalam mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu organisasi lokal dibidang lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh WPL dengan melibatkan fasilitator dalam pelatihan-pelatihan yang berguna untuk pengembangan skill dari fasilitator yang ada. Pelatihan tersebut merupakan hasil dari jejaring dengan berbagai pihak di bidang lingkungan dan kemasyarakatan, sehingga fasilitator yang telah mengikuti pelatihan dapat membagikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan tersebut kepada masyarakat binaannya. Program pelatihan yang dilakukan oleh WPL banyak difasilitasi oleh *Canadian International Development Agency* (CIDA) dalam programnya *urban environmental management application* (UEMA) yang diadakan se Asia Tenggara.

Service Task

a. Aktivitas Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan WPL sesuai dengan yang dikatakan oleh Uphoff dan Esman (1974 1984), dimana pelayanan yang diberikan oleh WPL kepada masyarakat Desa Rancamanyar menyesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Dibuktikan dalam penyusunan rencana dan tujuan, WPL menyerahkan seluruh keputusan kepada masyarakat. Dalam hal ini WPL menjadi wadah serta memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk berdiskusi bagaimana permasalahan yang ada dapat teratasi dengan mengembangkan potensi yang

ada. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Rubin dan Rubbin dalam (Green & Haines, Asset Building & Community Development (Fourth Edi), 2016) bahwa organisasi lokal dapat membuat aksi komunitas menjadi lebih efektif dengan membantu dalam mengembangkan keahlian. Dalam hal ini CBO dapat menyediakan hubungan yang lebih kuat antara pengetahuan lokal dan keahlian teknis. WPL memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki dengan menyediakan fasilitator sebagai pembina dan pendamping agar masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana langkah yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada di bantaran Sungai Citarum di Desa Rancamanyar. Tidak dapat dipungkiri, masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Citarum menjadi manusia yang paling mengetahui wilayahnya. Sehingga dengan hadirnya pelayanan yang diberikan WPL kepada masyarakat menggabungkan pengetahuan lokal dan keahlian teknis untuk pengelolaan bantaran Sungai Citarum yang berkelanjutan di Desa Rancamanyar

b. Integrasi Pelayanan

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) melibatkan organisasi lokal dalam tugas integrasi layanan tampaknya menawarkan peluang kepada lembaga pemerintah dan swasta untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari layanan mereka (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974). Sebagai organisasi lokal yang berjejaring dengan berbagai pihak, WPL berhasil menawarkan peluang kerjasama dengan pihak eksternal termasuk dari pemerintah, swasta, atau instansi yang lain untuk meningkatkan manfaat dari pelayanan. Terlihat dari kerjasama yang dilakukan dalam kegiatan *septic tank* kolektif, WPL bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, dan program ESP-USAID, sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran Sungai Citarum. Kegiatan

tersebut berdampak positif bagi masyarakat yang semula memiliki perilaku untuk buang air besar di pinggir sungai, kini mereka memiliki tempat untuk buang air besar dan tempat untuk menampung pembuangan agar tidak langsung ke sungai. Dengan keterlibatan WPL dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjaga lingkungan atau sumber daya alam yang tersedia, dapat memudahkan bagi berbagai pihak untuk memberikan pelayanan atau fasilitas agar bantaran Sungai Citarum dapat lebih terkelola di Desa Rancamanyar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak dapat menghasilkan hal yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pihak utama yang berperan dalam menjaga lingkungan di sekitarnya.

Ekstra-Organizational Task

a. Kontrol Kebijakan

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) organisasi lokal berfungsi sebagai kontrol dan koordinasi yang lebih besar dari bawah harus tersedia untuk melengkapi jika tidak menggantikan pengawasan atasan politik dan administratif (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974). WPL sebagai organisasi lokal yang mewakili masyarakat tergabung dalam TKPSDA WS Citarum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan pandangan Uphoff dan Esman (1974 1984) bahwa organisasi lokal berfungsi sebagai kontrol dan koordinasi yang lebih besar dari bawah. Dalam kegiatannya, TKPSDA berfungsi untuk membuat kebijakan-kebijakan serta memonitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah tersusun di rencana dan pola aksi. WPL membangun komunikasi dan koordinasi dengan anggota TKPSDA untuk membuat pemerintah dapat lebih bekerja sama dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Karena WPL sebagai organisasi lokal yang sadar akan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah sektor 7, WPL dapat

menyuarakan pendapat dari masyarakat atau isu-isu yang ada agar kebijakan yang buat dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selain itu, dengan kerja sama yang dibangun oleh WPL dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan Sungai Citarum, WPL sering kali berkoordinasi ketika ada kegiatan atau kebijakan yang tidak seharusnya dilakukan.

b. *Claim-making* pemerintah

Menurut Uphoff dan Esman (1974 1984) organisasi lokal harus memiliki kemampuan untuk membuat klaim secara positif yang kemudian dapat dianggap oleh para pemimpin politik atau pemerintah sejauh mereka menginginkan kepuasan yang lebih besar dari masyarakat pedesaan dan untuk mengartikulasikan dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan bantuan diri sendiri dan bekerja sama dengan pemerintah (Uphoff & Esman, Local organization for rural development: Analysis of Asian experience, 1974). Dengan tergabungnya WPL dalam TKPSDA, WPL turut andil dalam membuat kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk pengelolaan DAS Citarum. Sebagai organisasi lokal, WPL kaya akan pengetahuannya terhadap WS Citarum, khususnya Sektor 7, Desa Rancamanyar. Dengan pengetahuan tersebut, WPL dapat mewakili masyarakat agar kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh Rubin dan Rubbin dalam (Green & Haines, Asset Building & Community Development (Fourth Edi), 2016), organisasi lokal juga membuat aksi komunitas menjadi lebih efektif yang dapat dilihat dari organisasi menciptakan kekuatan. Pemerintah lebih memungkinkan dalam merespon permintaan CBO yang merepresentasikan orang-orang dalam jumlah yang besar dan juga individu lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek ketika tidak melakukannya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai Peranan Organisasi Lokal dalam Pengelolaan Bantaran Sungai Citarum (Studi Kasus Pada Warga Peduli Lingkungan di Sektor 7). Secara umum berdasarkan aspek-aspek peran organisasi lokal Warga Peduli Lingkungan, dapat disimpulkan Warga Peduli Lingkungan (WPL) memiliki peran penting sebagai organisasi lokal dan peran untuk melakukan pengembangan masyarakat di Sektor 7, Desa Rancamanyar.

Peran organisasi lokal dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Sektor 7 Desa Rancamanyar mampu menjadi salah satu hal yang melandasi berhasil memfasilitasi keberhasilan masyarakat dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum. Dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, WPL berhasil mengembangkan masyarakat untuk turut andil dalam pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Sektor 7, Desa Rancamanyar, yang berkelanjutan.

Keberhasilan ini tidak luput dari besarnya dukungan dari berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah lokal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang perlu dipertimbangkan untuk memelihara kesinambungan WPL adalah:

1. Untuk menjamin kesinambungan WPL, maka diperlukan sistem regenerasi, sehingga program-program WPL terus berkelanjutan dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
2. Pengembangan jaringan internet (teknologi digital) untuk mendukung operasi WPL dalam pengelolaan lingkungan dan daerah aliran sungai.

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang didapati maka dapat dipaparkan saran yang diberikan peneliti. Saran yang dipaparkan berkaitan dengan pengembangan organisasi Warga Peduli

Lingkungan dalam aspek regenerasi sumber daya dan pengelolaan pendanaan, serta untuk meningkatkan eksistensi melalui internet guna pengelolaan bantaran Sungai Citarum di Sektor 7 Desa Rancamanyar secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Juniarti, N. (2020). Upaya Peningkatan Kondisi Lingkungan Di Daerah Aliran Sungai Citarum. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 256-271.
- Sari, N. K. (2019). Penguatan Elemen Masyarakat Bantaran Sungai Sebagai Upaya Perubahan Perilaku Untuk Meningkatkan Kualitas Sungai Melalui Pilar Sanitasi dan Pengelolaan Lingkungan. *Artikel Lingkungan TL ITERA*, 1-5.
- Updani, I. A. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(1), 11-12.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset building & community development*. Sage publications.
- Uphoff, N. T. (1992). Local Institution and Participation for Sustainable Development. *Gatekeeper Series of the Sustainable Agriculture Program*, 31.
- citarum.org. (2010). *STAKEHOLDERS WILAYAH SUNGAI CITARUM*. Bandung: citarum.org.
- Dominelli, L. (2014). Promoting environmental justice through green social work practice: A key challenge for practitioners and educators. *International Social Work*, 57(4), 338-345.
- Uphoff, N. T., & Esman, M. J. (1984). *Local Organizational Intermediaries in Rural Development*.
- Rustiadi, E. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: IPB.

- Sutjiati, R. (2009). SEPUTAR MANAJEMEN KONFLIK. *Media Komunikasi Maranatha*, 18(2).
- Tribowo, D. (2006). *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Locher, D. A. (2002). *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Klandermans, B. (1984). Mobilization and Participation: Social-Psychological Expansions of Resource Mobilization Theory. *American Sociological Review*, 49(5).
- Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar- Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Uphoff, N. T., & Esman, M. J. (1974). *Local organization for rural development: Analysis of Asian experience*. Ithaca, NY: Cornell University Rural Development Committee.
- Asdak, C. (2007). Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *Gadjah Mada University Press*.
- Yayan, A., & Aziz, Y. M. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(2), 29-39.
- Fadjarajani, S., Singkawijaya, E. B., & Indriane, T. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Sungai Cimulu Di Kota Tasikmalaya. *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018. Restorasi Sungai: Tantangan dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan*, 2000, 248-254.
- Brennan, E. (2009). Definitions for Social Sustainability and Social Work Paper. *Course Hero*.
- Santoso, M. B., & Nurwati, N. (2021). Peranan Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan. *Sosio Informa*, 7(2).
- Alston, M. (2015). Social work, climate change and global cooperation. *International social work*, 58(3), 355-363.
- Ramdani, J. (2020). Intervensi Komunitas Berbasis Green Social Work. *Jurnal Obor Penmas*, 3(2), 270-277.
- Purwowibowo, Hariyono, S., & Wahyudi, D. (2017). Pekerjaan Sosial Komunitas Berbasis Lingkungan (Community Social Work Based On Environmental). *Share: Social Work Journal*, 7(1), 39-45.
- Dominelli, L. (2015). Green Social Work. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition (Second Edi, Vol. 10)*. Elsevier.
- Green, G. P., & Haines, A. (2016). *Asset Building & Community Development (Fourth Edi)*. <https://doi.org/10.4135/9781483398631>.